

Menteri LH Siap Beri Rekomendasi Cabut Izin

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyiapkan rekomendasi pencabutan izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang terbukti mengulang membakar lahan. Cara itu diyakini sanksi paling berefek jera agar praktik membuka lahan dengan cara membakar berhenti.

"Kalau ada korporasi mengulang membakar lahan, saya akan merekomendasi kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian agar menghentikan izin-izin yang diberikan," tutur Balthasar, di Jakarta, Jumat (2/5).

Pemberian rekomendasi itu tak perlu menunggu proses hukum di pengadilan rampung. Jika penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KLH punya bukti kuat, rekomendasi bisa diberikan.

Secara terpisah, Sudariyono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan, mengatakan, hingga kini rekomendasi itu belum pernah diterbitkan. Saat ini, terdapat lima perusahaan yang diselidiki atas dugaan kasus kebakaran Riau 2014 dan terlibat pada kebakaran Juni 2013.

Perusahaan itu berlokasi di Bengkalis (PT SPM dan SRL), Pelalawan (PT LIH), Rokan Hilir (PT RUJ), dan Indragiri Hilir (PT BN). Total terdapat tujuh perusahaan yang disidik KLH dan satu perusahaan disidik Polda Riau atas kebakaran lahan 2013. Sejumlah tersangka dari manajemen perusahaan telah ditetapkan dan menunggu pelimpahan ke kejaksaan (P19).

Seperti diberitakan, pada kebakaran 2014, PPNS KLH mencurigai 46 perusahaan terindikasi membakar. Lalu, 23 perusahaan disidik, 19 perusahaan didalami, dan 4 perusahaan bebas.

Dari 19 perusahaan yang didalami itu, kata Sudariyono, pihaknya menambah tiga perusahaan yang diselidiki, yaitu PT RPT (eks-logging) atau PT RRP (HTI), PT MAB (sawit), dan PT TPS/CPK (sawit). Total, 26 perusahaan diselidiki KLH.

Sementara itu Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin menjelaskan, pihaknya memberlakukan kebijakan pembukaan lahan tanpa pembakaran sejak perusahaan beroperasi. Saat ini, PT RAPP merupakan satu dari 26 perusahaan yang diselidiki KLH.

"Kami tidak membakar lahan untuk pembukaan area dan pengembangan hutan tanaman industri. Serat kayu hasil HTI dimanfaatkan untuk pembuatan pulp dan kertas. Tidak mungkin kami bakar bahan baku yang kami tanam, pelihara, dan panen setiap lima tahun," papar dia.

Perusahaannya telah mengintegrasikan teknologi pengelolaan hutan lestari dengan sistem deteksi dini (fire danger rating system/FDRS) dalam manajemen pencegahan kebakaran lahan.

Sementara itu Sandrawati Wibowo, Corporate Affairs Director Sinarmas Forestry, mengatakan, pihaknya mempersilakan PPNS KLH menunaikan tugasnya. "Tak mungkin kami bakar tanaman kami sendiri," kata dia. Sinar Mas Forestry merupakan induk dari PT Arara Abadi yang kini juga diselidiki KLH.